

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi. Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadi Sabari Yunus. 2005. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Belajar Offset. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Raja Grafindo Yogyakarta
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Supatra Nata, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali. Jakarta.
- Sirajuddin Didik Suriono Winardi. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Pers. Malang.
- Tarigan Robinson, 2019, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable*, Genta Pres. Yogyakarta.
- Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable*, Genta Pres. Yogyakarta.
- Wiyono R, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali. Jakarta.
- Waskito dkk. 2017. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Kencana. Jakarta
- Wisnu Arya Wardhana. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Waskito dkk. 2017. *Pertanahan Agraria dan Tata Ruang*. Kencana. Jakarta

SKRIPSI

- Amaliyah Suhaira, 2020, *Dampak Pembangunan Center Point Of Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Panambungan*, Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi (UIN) Alauddin Makassar.
- Sari Siti Annisa Aulia. 2016. *Peran Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Mengawasi Penyalahgunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan*. Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan



Budi Retna Sumardjito. 2012. *Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal Ngakglik Slema.* Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur. Vol. VIII No.1. Mei 2012.

Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintahan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Nomor 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Undang-Undang Nomor 26 Nomor 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang Pedoman
Perizinan Reklamasi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor:
6/LH/2016/PTUN.Mks



berhur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/TARKIM tertanggal 1

November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan
Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai Kawasan Strategi Provinsi





Optimized using
trial version
www.balesio.com